

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KREDITUR AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN *LEASING*
(Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN.Lmj)**

Oleh:

**Anisa Putri Rachmasari
E1A021163**

ABSTRAK

Wanprestasi dalam perjanjian *leasing* merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi dan memerlukan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian *leasing* di Indonesia dan mengkaji kedudukan objek *leasing* dalam Putusan No. 4/Pdt.G.S/2024/PN.Lmj. Kasus yang diteliti bermula ketika CV Kanza Putri Luis mengajukan permohonan pembiayaan investasi kepada PT BRI Multifinance. Tergugat kemudian melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran dan mengalihkan objek perkara kepada pihak ketiga tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus yang bersifat preskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian *leasing* terdiri dari perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Penggugat dalam putusan ini menuntut untuk pemenuhan prestasi. Perlindungan hukum represif diberikan melalui putusan pengadilan yang mewajibkan tergugat membayar Rp153.886.310,97 ditambah denda keterlambatan atau mengembalikan objek perkara secara sukarela maupun paksa. Penelitian ini menemukan bahwa hakim kurang tepat dalam mempertimbangkan kedudukan objek *leasing* karena tidak menerapkan Pasal 1977 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pihak yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengalihan objek *leasing* yang dilakukan *lessee* kepada pihak ketiga adalah sah secara hukum, meskipun dilakukan tanpa sepengetahuan *lessor*.

Kata Kunci: Kedudukan Benda, Perjanjian *Leasing*, Perlindungan Hukum, Wanprestasi.

**JUDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR CREDITOR DUE TO
DEBITOR DEFAULT IN A LEASING AGREEMENT
(Study of District Court Decision Number 4/Pdt.G.S/2024/PN.Lmj)**

By:

Anisa Putri Rachmasari

E1A021163

ABSTRACT

Default in leasing agreements is a legal issue that often occurs and requires adequate legal protection for the parties involved. This research aims to analyze the forms of legal protection in leasing agreements in Indonesia and examine the status of the leasing object in Decision No. 4/Pdt.G.S/2024/PN.Lmj. The case under study began when CV Kanza Putri Luis submitted an investment financing application to PT BRI Multifinance. The defendant then committed a breach of contract by failing to pay the installments and transferring the object of the case to a third party without permission. The research method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and prescriptive case study approach. Data were collected through library research and analyzed descriptively qualitatively. The research results show that legal protection in leasing agreements consists of preventive and repressive protection. Preventive legal protection is regulated in Article 1267 of the Civil Code, which grants the aggrieved party the right to demand performance fulfillment or cancellation of the agreement accompanied by compensation. The plaintiff in this ruling demands the fulfillment of the performance. Repressive legal protection is provided through a court decision that obliges the defendant to pay Rp153,886,310.97 plus a late fee or to return the object of the case voluntarily or forcibly. This research found that the judge was incorrect in considering the position of the leasing object because he did not apply Article 1977 of the Civil Code, which states that the party in possession of a movable object is considered its owner. Based on that provision, the transfer of the leasing object carried out by the lessee to a third party is legally valid, even if done without the lessor's knowledge.

Keywords: *Position of Object, Financing Lease, Legal Protection, Default.*